

**LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2020**

A. PENDAHULUAN

Salah satu kegiatan Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan adalah menerima dan memberikan layanan informasi terhadap permintaan informasi yang masuk. Permintaan informasi yang masuk dari masyarakat merupakan bentuk apresiasi masyarakat terhadap keberadaan BPK. Opini publik pun dapat terjadi dari hal tersebut, bagaimana BPK menangani dan melayani permintaan informasi akan dinilai oleh pihak-pihak di luar BPK.

Permintaan informasi dari masyarakat kepada BPK mengindikasikan bahwa BPK menjadi tumpuan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabilitas dan transparan yang bersih dan bebas dari KKN. Permintaan informasi ini bisa disampaikan melalui *website*, *e-mail*, surat, faksimili, maupun datang langsung ke PIK BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. Isi dari permintaan informasi masyarakat ini bermacam-macam, dimana mayoritas merupakan permintaan informasi terkait hasil pemeriksaan BPK yang menyangkut pengelolaan keuangan negara/daerah.

Untuk mendapatkan gambaran dan informasi tentang segala bentuk informasi publik yang diminta oleh masyarakat melalui saluran permintaan informasi, dibuatlah laporan secara berkala yang memuat informasi tersebut. Hasil laporan ini dapat menjadi masukan dan informasi bagi siapa saja yang berkepentingan.

Tujuan dari laporan ini adalah untuk mengetahui kebutuhan informasi dan harapan masyarakat akan keberadaan BPK dalam menjalankan kegiatan, tugas, dan fungsinya sebagai lembaga pemeriksa yang transparan dan akuntabel.

B. HASIL KEGIATAN

Permintaan informasi ataupun komplain yang berasal dari publik internal maupun eksternal BPK dapat disalurkan melalui beberapa saluran informasi yakni *website*, surat/*e-mail*/telepon, ataupun datang langsung ke Pusat Informasi dan Komunikasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan (PIK BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan) yang beralamat di kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, Jalan A. Yani Km. 32,5, Banjarbaru.

**RESUME ANALISIS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2020**

No.	KLASIFIKASI		URAIAN
1.	Pelayanan Informasi Publik:	:	Total : 28
	Pemintaan Informasi	:	15
	Pengaduan Masyarakat	:	13
	Komplain atas Informasi	:	-
2.	Mayoritas Jenis/Topik:		
	a) Permintaan Informasi	:	15
	b) Pengaduan Masyarakat	:	13
	c) Keberatan atas Informasi	:	-
3.	Permintaan Informasi, Pengaduan Masyarakat dan Keberatan atas Informasi yang Masih Dalam Proses:		
	a) Permintaan Informasi	:	-
	b) Pengaduan Masyarakat	:	-
	c) Keberatan atas Informasi	:	-
4.	Komplain atas Informasi		-

C. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan menyadari pentingnya keterbukaan informasi bagi publik dan konsekuensi yang ditimbulkan jika tidak melaksanakannya. Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada BPK, mengatur mengenai pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan BPK serta Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) sebagai sarana penerimaan permintaan informasi maupun pengaduan masyarakat.

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal No.272/K/X-XIII.2/6/2015, Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa pelaksanaan tugas teknis PPID BPK dilakukan oleh PIK sebagai unit pelaksana pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Pelaksanaan pelayanan informasi publik yang mencakup fungsi PPID dan PIK pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan oleh Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan.

Dalam memberikan pelayanan informasi publik, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan berupaya untuk memenuhi permintaan kebutuhan data dengan memberikan *softcopy* terlebih dahulu dan tidak dipungut biaya. Apabila diperlukan *hardcopy* dokumen dalam jumlah

besar, maka biaya penggandaan dibebankan pada pemohon informasi. Dalam hal ini, anggaran untuk pelayanan informasi publik BPK dibebankan pada anggaran subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan.

Untuk mendukung proses pengelolaan informasi publik, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan telah memiliki berbagai formulir yang digunakan dalam kegiatan pelayanan permintaan informasi publik antara lain:

1. Formulir Permintaan Informasi Publik;
2. Formulir Tanda Terima Penyerahan Dokumen Informasi Publik
3. Formulir Pengaduan Masyarakat
4. Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik

D. REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Selama Tahun 2020, jumlah pelayanan informasi publik di BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, baik yang diterima melalui saluran *website*, *e-mail*, surat, faksimili, maupun datang langsung ke PIK BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1 Jumlah Pelayanan Informasi Publik BPK

No.	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah
1	Permintaan Informasi	15
2	Pengaduan Masyarakat	13
3	Keberatan atas Informasi	-
	Total	28

1. PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI

a. Saluran Permintaan Informasi & Komplain Atas Informasi

Selama Tahun 2020, analisis kuantitatif pelayanan permintaan informasi dan komplain atas informasi di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang masuk melalui *website*, *e-mail*, surat, faksimili, maupun datang langsung ke PIK BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Saluran Permintaan Informasi

No.	Saluran	Jumlah
1	Website	-
2	Surat/Email/Telepon	15
3	Langsung	-
	JUMLAH	15

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun 2020 terdapat lima belas permintaan informasi yang masuk melalui surat/email/telepon maupun melalui website. Sehubungan dengan pencegahan Covid-19 dan pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah (*work from home*) layanan tatap muka ditiadakan dan informasi tersebut telah diunggah di *website* BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan (www.banjarmasin.bpk.go.id) serta ditempel di ruang PIK.

b. Permintaan Informasi Berdasarkan Jenis Informasi

Sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, permintaan informasi yang masuk ke BPK diklasifikasikan berdasarkan jenis informasi yaitu informasi berkala, informasi serta merta, informasi setiap saat, informasi yang dikecualikan, dan informasi lain-lain diluar jenis informasi yang ada.

Pada Tahun 2020, analisis kuantitatif jenis permintaan informasi yang masuk ke BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut.

Tabel 3. Permintaan Informasi Berdasarkan Jenis Informasi

No.	Saluran	Jumlah
1	Berkala	15
2	Serta Merta	-
3	Setiap Saat	-
4	Dikecualikan	-
5	Informasi lain-lain	-
	JUMLAH	15

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa selama Tahun 2020 terdapat lima belas permintaan informasi yang masuk pada jenis informasi berkala. Tidak ada permintaan informasi pada jenis serta merta, setiap saat, dikecualikan maupun informasi lain-lain.

c. Topik Permintaan Informasi

Permintaan informasi yang masuk ke BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dikategorikan ke dalam topik permintaan informasi yaitu permohonan pemeriksaan, informasi permasalahan penyimpangan keuangan negara/daerah, laporan hasil pemeriksaan, kepegawaian/SDM, informasi BPK yang dipublikasikan, dan lain-lain. Kategori permintaan informasi pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 4. Topik Permintaan Informasi

No.	Topik	Jumlah
1	Permohonan Pemeriksaan	-
2	Informasi Permasalahan Penyimpangan Keuangan Negara/Daerah	-
3	Laporan Hasil Pemeriksaan	13
4	Kepegawaian/ SDM	-
5	Informasi BPK Yang Dipublikasikan	-
6	Lain-lain	2
7	Sampah (<i>Trash</i>)	-
	JUMLAH	15

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa selama Tahun 2020, topik permintaan informasi yang masuk adalah tiga belas (13) topik permintaan laporan hasil pemeriksaan dan dua (2) topik permintaan lain-lain.

d. Tanggapan Terhadap Permintaan Informasi

Seluruh permintaan informasi yang masuk ke BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan akan ditanggapi dengan pemenuhan informasi yang diminta oleh si pemohon informasi dengan syarat informasi yang diminta merupakan informasi yang tersedia di BPK dan bukan informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan BPK RI No.1 Tahun 2018.

Pada Tahun 2020, analisis kuantitatif atas tanggapan terhadap pelayanan permintaan informasi di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut.

Tabel 5. Tanggapan Terhadap Permintaan Informasi

No	Topik	Jlh	Dipenuhi	Tidak/Belum Dipenuhi/ Dalam Proses	% Dipenuhi	Ket.
	Pemeriksaan					
1	Permohonan Pemeriksaan	-	-	-	-	-
2	Informasi Permasalahan Penyimpangan Keuangan Negara/Daerah	-	-	-	-	-
3	Laporan Hasil Pemeriksaan	13	13	-	100%	-
	Non Pemeriksaan					
4	Kepegawaian/SDM	-	-	-	-	-
5	Informasi BPK yang dipublikasikan	-	-	-	-	-
6	Lain-lain	2	2	-	100%	-
7	Sampah (<i>Trash</i>)	-	-	-	-	-
	JUMLAH	15	15	-	100%	-

Permintaan informasi yang masuk pada Tahun 2020 sebanyak lima belas permintaan dengan topik pemeriksaan yaitu permintaan Laporan Hasil Pemeriksaan dan non pemeriksaan berupa permintaan informasi visi dan misi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dan permintaan informasi temuan dalam pemeriksaan dalam IHPS Tahun 2019 telah dipenuhi seluruhnya.

e. Tindak Lanjut Permintaan Informasi

Permintaan informasi yang masuk ke BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan akan ditanggapi dengan tindak lanjut. Pada Tahun 2020, analisis kuantitatif atas tindak lanjut terhadap pelayanan permintaan informasi di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut.

Tabel 6. Tindak Lanjut Permintaan Informasi

No.	Tanggal Masuk	Asal Surat	Informasi yang diminta	Status	Tindaklanjuti
1.	27 Januari 2020	Ketua STIE Pancasetia Banjarmasin 27 Januari 2020	Informasi mengenai visi dan misi BPK Perwakilan Kalimantan Selatan	Selesai	Selesai. Data diberikan dalam bentuk softcopy
2.	17 Februari 2020	Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan	Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD TA.2016 s.d 2018	Selesai	Selesai. Data diberikan dalam bentuk softcopy.
3.	4 Maret 2020	Kepala Harian Sinar Pagi Baru Perwakilan Kalimantan Selatan	Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Selatan TA.2019	Selesai	Memberikan keterangan secara lisan dan tertulis melalui surat keluar Kepala Perwakilan bahwa pemeriksaan atas LKPD Provinsi Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Selatan TA. 2019 belum dilaksanakan
4.	27 Maret 2020	Kejaksaan Negeri Banjarbaru	LHP pada Pemerintah Kota Banjarbaru tahun 2017, 2018 dan 2019	Selesai	Data diberikan melalui email dalam bentuk softcopy.
5.	23 Juni 2020	Kepala Kantor DJPB Wilayah Kalimantan Selatan	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah se-Provinsi Kalimantan Selatan TA. 2019	Selesai	Data diberikan dalam bentuk softcopy
6.	7 Juli 2020	Misradin (Harian Sinar Pagi)	LHP atas LKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Selatan TA. 2019 dan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)	Selesai	Selesai. Data diberikan dalam bentuk softcopy

7.	8 Juli 2020	H. Gusti Farid Hasan Aman, SE., Akt., MBA (Anggota DPD RI utusan Kalsel)	Informasi tentang temuan pemeriksaan dalam IHPS II Tahun 2019	Selesai	Selesai. Data diberikan dalam bentuk softcopy.
8.	8 Juli 2020	Yadi Rahmadi, S.H (Advokat Hukum)	Hasil Pemeriksaan pengadaan tanah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong TA.2017	Selesai	Selesai. Data diberikan dalam bentuk softcopy
9.	10 Juli 2020	Dwianto Prihartono (Kejati Kalsel)	LHP LKPD TA. 2019 dan PDTT TA.2016 s.d 2019	Selesai	Data diberikan melalui email dalam bentuk softcopy.
10.	16 Juli 2020	Bahrudin (LSM Kelompok Suara Hati Nurani Masyarakat)	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah se- Provinsi Kalimantan Selatan TA. 2019	Selesai	Data diberikan dalam bentuk softcopy
11.	17 Juli 2020	Herman Hermawan (BPKP Kalsel)	LHP atas LKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Selatan TA. 2019	Selesai	Data diberikan dalam bentuk softcopy
12.	5 Agustus 2020	Hendri Yulianto, SIK.,MH (Polda Kalsel)	LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019	Selesai	Data diberikan dalam bentuk softcopy
13.	5 November 2020	Herman Eryudi	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019	Selesai	Data diberikan dalam bentuk softcopy
14.	23 November 2020	Helmi Mardani	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2014	Selesai	Data diberikan dalam bentuk softcopy

15.	16 Desember 2020	Drs. H. Yuzair Noor, M.Si (Inspektorat Kabupaten Tabalong)	1. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban DAK bidang pendidikan Rahun 2007, 2008, 2009 dan 2010 (triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Tabalong dan Intansi Terkait di Tanjung 2. LHP atas Belanja Modal Infrastruktur TA 2013 dan 2014 (s.d Triwulan III) pada Pemda Tabalong 3. LHP atas LKPD TA. 2006 4. LHP atas LKPD TA. 2014	Selesai	Data diberikan dalam bentuk softcopy
-----	------------------------	--	--	---------	--

Permintaan informasi yang masuk pada Tahun 2020 sebanyak lima belas permintaan telah selesai ditindaklanjuti dan tidak ada komplain atas informasi baik yang masuk melalui saluran website, surat/email/telepon, ataupun langsung ke PIK BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

2. PENGADUAN MASYARAKAT

a. Saluran Pengaduan Masyarakat

Pengaduan masyarakat yang berasal dari publik eksternal BPK dapat disalurkan melalui beberapa saluran pengaduan yakni *website*, surat/e-mail/telepon, ataupun datang langsung ke Pusat Informasi dan Komunikasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang beralamat di kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, Jalan A. Yani Km 32,5 Banjarbaru.

Pada Tahun 2020, analisis kuantitatif pengaduan masyarakat di BPK melalui saluran *website*, surat/email/telepon, maupun datang langsung adalah sebagai berikut.

Tabel 7. Persentase Saluran Pengaduan Masyarakat

No	Saluran	Jumlah	Persentase
1	Website	-	-
2	Surat/Email/Telepon	13	100%
3	Langsung	-	-
4	Kotak Pengaduan	-	-
	JUMLAH	13	100%

Saluran pengaduan masyarakat yang masuk ke BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan selama Tahun 2020 melalui surat/email/telepon sebanyak tiga belas pengaduan.

b. Topik Pengaduan Masyarakat

Pengaduan masyarakat yang masuk ke BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dapat dikategorikan ke dalam topik pengaduan yang terkait dengan pemeriksaan dan non pemeriksaan. Topik pengaduan terkait dengan pemeriksaan yaitu permohonan pemeriksaan, informasi permasalahan penyimpangan keuangan negara/daerah dan laporan hasil pemeriksaan. Sedangkan topik pengaduan non pemeriksaan yaitu kepegawaian/SDM, informasi BPK yang dipublikasikan dan lain-lain.

Selama Tahun 2020, pengaduan masyarakat yang masuk diklasifikasikan berdasarkan topik sebagai berikut.

Tabel 8. Persentase Topik Pengaduan Masyarakat

No	Topik	Jumlah	Persentase
	Pemeriksaan		
1	Permohonan Pemeriksaan	-	-
2	Informasi Permasalahan Penyimpangan Keuangan Negara/Daerah	13	100%
3	Laporan Hasil Pemeriksaan	-	-
	Non Pemeriksaan		
4	Kepegawaian/ SDM	-	-
5	Informasi BPK yang dipublikasikan	-	-
6	Lain-lain	-	-
	JUMLAH	13	100%

Pengaduan masyarakat yang masuk selama Tahun 2020 dapat dikategorikan dalam topik pemeriksaan berupa informasi permasalahan penyimpangan keuangan negara/daerah sebanyak tiga belas laporan.

c. Tanggapan Terhadap Pengaduan Masyarakat

Pada Tahun 2020, pengaduan masyarakat yang masuk ke BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan telah ditanggapi dan diteruskan ke satker. Adapun analisis kuantitatif pengaduan masyarakat yang ditanggapi adalah sebagai berikut.

Tabel 9. Tanggapan Atas Pengaduan Masyarakat

No	Topik	Jlh	Yang Ditanggapi Oleh Subbag Humas dan TU Kalan	Yang Diteruskan Ke Satker	Trash
	Pemeriksaan				
1	Permohonan Pemeriksaan	-	-	-	-
2	Informasi Permasalahan Penyimpangan Keuangan Negara/Daerah	13	-	13	-
3	Laporan Hasil Pemeriksaan	-	-	-	-
	Non Pemeriksaan	-	-	-	-
4	Kepegawaian/ SDM	-	-	-	-
5	Informasi BPK yang dipublikasikan	-	-	-	-
6	Lain-lain	-	-	-	-
	JUMLAH	13	-	13	-

Pengaduan masyarakat yang masuk selama Tahun 2020 sebanyak tiga belas pengaduan masyarakat telah ditanggapi dan diteruskan ke satuan kerja terkait.

d. Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat

Selama tahun 2020, pengaduan masyarakat yang masuk ke BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan telah ditanggapi dan diteruskan ke satuan kerja terkait.

E. KEBERATAN ATAS INFORMASI

Selama Tahun 2020 tidak terdapat keberatan atas informasi.

F. KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik selama Tahun 2020 tidak terdapat kendala baik internal maupun eksternal.

G. RENCANA TINDAK LANJUT

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan informasi publik sesuai maklumat yang telah kami buat untuk masyarakat lebih dekat, respon cepat mendapatkan informasi dan biaya hemat. Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan antara lain:

1. Menyusun *database* pengaduan masyarakat;
2. Melakukan peningkatan kompetensi petugas PIK secara berkelanjutan.

3. Meningkatkan komunikasi petugas PIK dan satuan kerja terkait mengenai tindak lanjut atas permintaan informasi dan pengaduan masyarakat.

H. KESIMPULAN

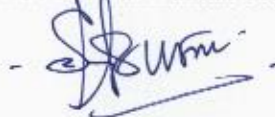
Pada Tahun 2020, terdapat lima belas permintaan informasi yang masuk ke BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dan tidak ada komplain atas informasi yang masuk melalui saluran website, surat/email/telepon, ataupun langsung. PIK BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan memberikan layanan melalui email banjarmasin@bpk.go.id. Sehubungan dengan pencegahan Covid-19 dan pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah (*work from home*) layanan tatap muka ditiadakan dan informasi tersebut telah diunggah di website BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan (www.banjarmasin.bpk.go.id) serta ditempel di ruang PIK.

Adapun laporan pengaduan masyarakat yang masuk sebanyak tiga belas laporan dan telah ditindaklanjuti seluruhnya. Pemenuhan permintaan dokumen dapat dipenuhi sebelum sepuluh hari kerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Infomasi Publik.

Demikian Laporan Pelayanan Informasi dan Komunikasi ini dibuat dengan harapan hasil laporan ini dapat menjadi masukan dan informasi bagi siapa saja yang berkepentingan.

Banjarbaru, April 2021

Mengetahui,
Plh. Kepala Perwakilan
BPK Provinsi Kalimantan Selatan



Setyo Esti Agustini
NIP 196808161996032002

Ketua Pusat Informasi dan Komunikasi
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan



Setyo Esti Agustini
NIP 196808161996032002